

## ABSTRAK

**Latar Belakang** : Di Indonesia pengiriman barang mentah/ekspor keluar negeri sampai saat ini tetap terjadi bahkan sampai tahun 2022. Padahal pengiriman barang mentah keluar negeri telah dilarang sejak tahun 2014 dan harus dimurnikan dalam negeri. Sehingga penelitian ini diangkat dengan judul ‘Sinkronitas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 06 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Keluar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian Terhadap Undang - Undang No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara’ memiliki rumusan masalah apakah materi muatan Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 telah sesuai dengan Undang-undang Minerba. **Tujuan** : Untuk mengetahui muatan materi Permen ESDM No. 06 Tahun 2017 telah sesuai dengan Undang-undang minerba. **Metode** : Dalam penelitian ini menggunakan metode *statute approach* yaitu menggunakan pendekatan Perundang-undangan. **Sumber data** : yang digunakan adalah data-data primer, sekunder, dan tersier. **Pengumpulan data** : yang digunakan adalah menggunakan teknik studi dokumen dan kepustakaan. **Landasan teori** : yang digunakan antara lain pengertian Peraturan Menteri, Teori Negara Hukum, Pengertian Hierarki Norma hukum, Judicial Review, dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa isi dari Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 tidak sesuai dengan isi yang ada dalam Undang-undang Minerba. Karna isi dalam UU Minerba telah dijelaskan secara tegas dan jelas bahwa dilarang mengirim barang mentah keluar negeri dan harus dimurnikan dalam negeri sejak tahun 2014 akan tetapi Menteri membuat Permen No. 6 Tahun 2017 dan isi dari Permen tersebut memperbolehkan mengirim barang mentah keluar negeri dengan persyaratan tertentu sampai tahun 2022. Dan di dalam tata urutan perundang-undangan UU minerba berada di atasnya Peraturan Menteri tetapi isi dari Permen melebihi UU Minerba.

## ABSTRAK

**Background** : In indonesia, the shipment of raw materials from abroad to date continue to occur even until 2022, even though shipments of raw materials abroad have been banned since 2014 and must be purified domestically. So this research was raised with the title “synchronization of mineral resources mineral regulation number a 6 of 2017 concerning the procedures and requirements for giving recommendation on the implementation of the sale of mineral products from the processing and refining of law number 4 of 2009 concerning mining of minerlas and coal”. Has the formulation of the problem whether the material content of the ministerial regulation ESDM No. 06 of 2017 is in accordance with the law min.

**Purpose** : To find out whether the material contained in the Ministar of Energy and Mineral Resources Regulation No. 6 of 2017 is in accordance with the mineral and coal law.

**Method** : in this study using the statute approach. **Data sources** : Used are primary, secondary, and tertiary data.

**Data collection** : Used is using document study techniques and literature. **Theoretical basis** : Used among others the understanding of the minister, the theory of the rule of law, the understanding of the hierarchy of legal norms, judicial review, and the principle of establishing statutory regulations. Based on data analysis that has been done, it can be concluded that the contents of ESDM ministerial regulation number 6 of 2017 are not in accordance with the contents contained in the mining law. Because the contents of the mineral law have been explicitly and clearly explained that it is prohibited to send raw goods out of the country and must be purified domestically since 2014, but the minister will make ministerial regulation number 6 in 2017 and the contents of the ministerial regulation allow sending raw materials abroad with certain conditions until 2022. And in the statutory order the invitation to the mineral law is above ministerial regulations but the contents of ministerial regulations exceed the law mi.